

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2020-2024, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi terbukti memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara penuh dan merata oleh semua daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis mencerminkan pemerataan hasil pembangunan, terutama apabila aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
2. Belanja daerah terbukti memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan pengeluaran daerah belum sepenuhnya mencapai distribusi yang merata, karena kesenjangan dalam kapasitas fiskal dan distribusi pengeluaran di antara daerah masih terus berlanjut, kondisi ini menunjukkan bahwa dampak

belanja daerah terhadap ketimpangan pendapatan sangat bergantung pada efektivitas, komposisi, dan sasaran alokasi anggaran.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Meskipun IPM telah meningkat di berbagai daerah, peningkatan ini belum memberikan dampak yang substansial terhadap perubahan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia perlu diikuti dengan pemerataan akses kerja, produktivitas, dan kesempatan ekonomi agar dapat berdampak lebih nyata terhadap penurunan ketimpangan.
4. Upah minimum terbukti memiliki dampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Kenaikan upah minimum cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan, yang mencerminkan bahwa kebijakan upah minimum belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang merata di seluruh wilayah. Kondisi ini dapat terjadi karena manfaat kenaikan upah minimum belum sepenuhnya dirasakan secara merata, terutama antara pekerja sektor formal dan informal serta antara wilayah industri dan non-industri.
5. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut

secara bersama-sama memiliki keterkaitan dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan antarwilayah selama periode penelitian.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil studi ini, diajukan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, didorong untuk memanfaatkan temuan studi ini sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil. Upaya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata, mengoptimalkan alokasi belanja pemerintah daerah, dan mengurangi kesenjangan antardaerah harus ditingkatkan guna meminimalkan ketimpangan pendapatan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada wilayah dengan aktivitas ekonomi besar, tetapi juga mampu mendorong daerah dengan kapasitas ekonomi yang lebih rendah.

### 2. Bagi Perencana Pembangunan dan Pembuat Kebijakan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengembangkan strategi pembangunan yang lebih inklusif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah minimum, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah. Selain itu, alokasi belanja daerah perlu diarahkan pada sektor produktif dan

layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program yang dapat memperluas akses ekonomi masyarakat.

### 3. Bagi Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah

Studi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memahami kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur, serta mendorong koordinasi yang lebih baik antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang lebih adil dan merata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja agar peningkatan IPM dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pemerataan pendapatan.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan variabel lain yang mungkin memengaruhi ketimpangan pendapatan, dan juga dapat mempertimbangkan perbedaan struktur ekonomi antarwilayah agar analisis ketimpangan pendapatan menjadi lebih mendalam.